

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kinerja Keuangan**

Masalah keuangan merupakan salah satu masalah utama yang mempengaruhi kelangsungan hidup suatu entitas. Setiap kegiatan operasi harus ditangani secara profesional untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan atau kekurangan dana yang justru dapat menyebabkan kebangkrutan. Untuk mengetahui kinerja suatu entitas, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya dari tahun ke tahun maupun kinerja pada tahun berjalan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Hutabarat, 2020).

##### **2.1.1 Tujuan Kinerja Keuangan**

Tujuan penilaian kinerja perusahaan yaitu sebagai berikut (Hutabarat, 2020):

- a. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi.

- c. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil dapat diukur melalui kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas hutang-hutangnya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham.

## **2.2 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakainya dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Laporan Keuangan ialah proses akuntansi perusahaan yang dicatat yang kemudian digunakan menjadi alat untuk memberitahu kepada pihak yang berkepentingan bagaimana data keuangan dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan informasi yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Hutabarat, 2020).

### **2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2020):

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### 2.2.2 Komponen Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi (Peraturan Pemerintah RI, 2019) :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Statement of Budget Realization*) yang terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL, laporan finansial yang terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK, dan CaLK. Komponen laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2020) :

- a. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
- d. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- e. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

- f. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

### **2.3 Konsep *Value for Money***

Pada penilaian kinerja pemerintah terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam perhitungannya, seperti masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil. Masukan (*input*) dapat diartikan sebagai sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan, program atau tindakan, sedangkan keluaran (*output*) diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan yang telah dilaksanakan, serta istilah hasil pada perhitungan ini dapat diartikan sebagai akibat yang muncul dari penyelesaian atas suatu pekerjaan tertentu. *Value for money* merupakan salah satu jembatan untuk mewujudkan *good governance* dalam suatu organisasi. *Value for money* menghendaki segala sumber daya publik digunakan dengan prinsip ekonomi, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (Mardiasmo, 2018).

### 2.3.1 Elemen *Value for Money*

Elemen *value for money* terdiri dari Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas. Berikut adalah penjelasan elemen tersebut:

a. Ekonomi

Ekonomi yaitu pemerolehan sumber daya (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Majid, 2019).

b. Efisiensi

Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Majid, 2019).

c. Efektivitas

Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Majid, 2019).

### 2.3.2 Manfaat Implementasi *Value for Money*

Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain (Majid, 2019):

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*.
- d. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

### 2.3.3 Rumus Perhitungan dan Kriteria *Value for Money*

- a. Ekonomi

$$Ekonomi = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Anggaran Belanja Operasional}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kinerja berdasarkan rasio ekonomi adalah sebagai berikut (Madewi et al., 2023):

- 1) Jika diperoleh nilai perbandingan  $> 100\%$  maka Sangat Ekonomis.
- 2) Jika diperoleh nilai perbandingan  $90\% - 100\%$  maka Ekonomis.
- 3) Jika diperoleh nilai perbandingan  $80\% - 90\%$  maka Cukup Ekonomis.

- 4) Jika diperoleh nilai perbandingan 60% - 80% maka Kurang Ekonomis.
- 5) Jika diperoleh nilai perbandingan < 60% maka Tidak Ekonomis.

b. Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasional}{Realisasi\ Pendapatan\ Usaha} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kinerja berdasarkan rasio efisiensi adalah sebagai berikut (Madewi et al., 2023):

- 1) Jika diperoleh nilai perbandingan > 100% maka Tidak Efisien.
- 2) Jika diperoleh nilai perbandingan 90% - 100% maka Kurang Efisien.
- 3) Jika diperoleh nilai perbandingan 80% - 90% maka Cukup Efisien.
- 4) Jika diperoleh nilai perbandingan 60% - 80% maka Efisien.
- 5) Jika diperoleh nilai perbandingan < 60% maka Sangat Efisien.

c. Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Usaha}{Anggaran\ Pendapatan\ Usaha} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kinerja berdasarkan rasio efektivitas adalah sebagai berikut (Madewi et al., 2023):

- 1) Jika diperoleh nilai perbandingan > 100% maka Sangat Efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai perbandingan 90% - 100% maka Efektif.

- 3) Jika diperoleh nilai perbandingan 80% - 90% maka Cukup Efektif.
- 4) Jika diperoleh nilai perbandingan 60% - 80% maka Kurang Efektif.
- 5) Jika diperoleh nilai perbandingan < 60% maka Tidak Efektif.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kinerja Keuangan Layanan (BLU) RSUD Dr. Soedomo Trenggalek Dengan Metode <i>Value For Money</i> (Madewi et al., 2023)	Metode Deskriptif Kualitatif.	Hasil pengukuran <i>value for money</i> pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek dari segi ekonomis dikategorikan sangat ekonomis, dari segi efisiensi dikategorikan kurang efisien dan dari segi efektivitas dikategorikan efektif.
2.	Konsep <i>Value For Money</i> Pengukuran Keuangan Pada Kinerja Rumah	Metode Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD Balung selama periode tersebut dikategorikan ekonomis secara keseluruhan.

<p>Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember (Nahdia &amp; Sugiartono, 2023)</p>	<p>Secara khusus, RSUD Balung dinilai tidak efisien pada tahun 2018, sementara efisien pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021. Selain itu, RSUD Balung dinilai tidak efektif pada tahun 2017, 2018, dan 2021, namun efektif pada tahun 2019 dan 2020.</p>
<p>3. Analisis Laporan Metode Deskriptif Realisasi Anggaran Kuantitatif. Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan Efisiensi Kinerja Keuangan BLUD (Syarifanur &amp; Saleh, 2022)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja BLUD RSUD dr Zainoel Abidin masih kurang ekonomis dan tidak efisien, namun sudah efektif berdasarkan Pengukuran Kinerja Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun 2017.</p>
<p>4. Analisis Laporan Metode Deskriptif Realisasi Anggaran Kuantitatif. Untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, Dan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman masih kurang ekonomis dan tidak efisien,</p>

---

Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan BLUD RSUD Sleman Kabupaten Sleman			namun efektif berdasarkan Peraturan Pengukuran Kinerja Menteri Keuangan nomor 214 Tahun 2017.
(Azizah et al., 2024)			

---

5. Analisa Realisasi Anggaran RSUD Prov. NTB Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi, Efektivitas Dan Efisiensi Keuangan BLUD Tahun 2020-2022	Laporan Metode Deskriptif Kuantitatif.		Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran BLUD RSUD Prov. NTB tahun 2020-2022 dari segi ekonomis dikategorikan cukup ekonomis, dari segi efisiensi dikategorikan tidak efisien dan dari segi efektivitas dikategorikan efektif.
(Marasabessy et al., 2024)			

---